

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sejak diberlakukannya reformasi keuangan pada tahun 2001, Indonesia telah menerapkan desentralisasi fiskal. Langkah ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara ini.

Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah pusat telah membagi sebagian tanggung jawab keuangan kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sebagian pendapatan serta membuat keputusan mengenai pengeluaran di wilayahnya. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan fiskal, mengelola pajak daerah, serta mengatur dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

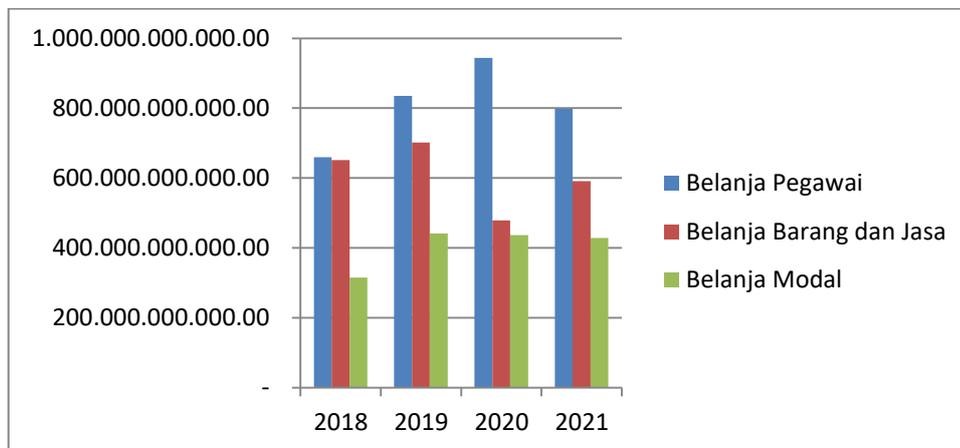
Berlakunya desentralisasi fiskal telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pemerintah daerah kini memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur keuangan mereka sendiri dan membuat keputusan tentang pengeluaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan khusus setiap daerah. Peningkatan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik, menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal di sektor publik, pemerintah daerah harus meningkatkan realisasi anggaran. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam masalah realisasi belanja modal. Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal telah mengakibatkan rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah, sehingga realisasi belanja modal masih berada di bawah target rata-rata nasional.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap atau meningkatkan nilai aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengalokasian belanja modal bertujuan untuk membangun fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sayangnya, selama ini pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan pendapatan daerah untuk belanja operasi yang digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) periode daripada belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode.

Akibatnya, terjadi permasalahan yaitu rendahnya realisasi belanja modal. Rendahnya realisasi belanja modal dapat menghambat pembangunan fasilitas pelayanan publik di daerah, termasuk proyek pembangunan, infrastruktur, serta menyebabkan penurunan daya saing ekonomi dan kesenjangan pembangunan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: data yang diolah (2023)

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi belanja modal adalah dengan melakukan pembenahan manajemen penerimaan daerah, khususnya dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah tersebut, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah. Tingkat PAD di setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada kekayaan alam dan potensi ekonomi yang dimiliki. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar daripada daerah lainnya, yang dapat menyebabkan ketimpangan antara daerah yang kaya dan daerah yang tertinggal.

Dalam mengatasi ketimpangan ini dan meningkatkan realisasi belanja modal, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan PAD dengan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengumpulkan pendapatan serta mengurangi potensi kebocoran atau penyimpangan. Upaya peningkatan PAD juga dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi, serta menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.

Selain itu, kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi dengan daerah yang memiliki PAD rendah dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan. Transfer pendapatan antardaerah atau pembagian hasil dari kekayaan alam dapat membantu daerah yang lebih tertinggal dalam mewujudkan proyek pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih baik dalam mengelola pendapatan asli daerah, meningkatkan realisasi belanja modal, dan menciptakan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dana perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat keuangan daerah dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dana perimbangan ini memiliki tiga jenis utama: dana lokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana lokasi umum adalah alokasi dana dari pemerintah pusat yang membantu membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana alokasi khusus adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan

infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi daerah. Sedangkan, dana bagi hasil merupakan bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di daerah dan diberikan kembali kepada pemerintah daerah.

Tujuan utama dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan memastikan pemerataan pendapatan serta akses terhadap layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pendanaan yang adil ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah dapat ditingkatkan, serta memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik. Hal ini mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh nusantara dan memperkuat ikatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan nasional.

Selain pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) merupakan salah satu sumber pendanaan tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Khususnya dalam hal belanja modal, SiLPA memiliki peran penting sebagai sumber dana untuk mendukung kegiatan belanja modal pada tahun berikutnya. Apabila pemerintah daerah memiliki SiLPA yang besar, sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan realisasi belanja modal. Penggunaan SiLPA dalam belanja modal dapat mencakup pembiayaan proyek infrastruktur yang masih berjalan, sehingga proyek-proyek yang telah dimulai dapat selesai tepat waktu tanpa kekurangan dana. Selain itu, SiLPA juga dapat digunakan untuk memulai proyek baru yang telah direncanakan sebelumnya, yang mungkin sebelumnya belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Dengan memanfaatkan SiLPA secara efisien dan efektif, pemerintah daerah dapat berkontribusi pada peningkatan investasi dalam pembangunan fisik dan infrastruktur di wilayahnya. Hal ini akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh warga di daerah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan SiLPA dengan baik menjadi

penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian Pika, Saipul & Aprila Nila, (2018) menyimpulkan bahwa PAD, SiLPA, dan Pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Penelitian Fitri Dwi Jayanti, (2020) menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Sayyid Al Habib Ahmad Nasution, Kiagus Zainal Arifin & Choiruddin, (2022) menyimpulkan bahwa PAD dan Dana perimbangan secara persial berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan SiLPA secara persial tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan silpa berpengaruh terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya perbedaan hasil dari berbagai peneliti, hal tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap realisasi belanja modal?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap realisasi belanja modal?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap realisasi belanja modal?
4. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil terhadap realisasi belanja modal?
5. Bagaimana pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap realisasi belanja modal?

6. Bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA, secara simultan terhadap realisasi belanja modal?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian kali ini adalah membahas terkait pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, dan realisasi belanja modal. Untuk mempermudah peneliti dalam menyederhanakan agar tidak meyimpang dari tema yang telah ditentukan, maka peneliti berfokus pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menyimpulkan dan menganalisis :

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pengaruh dana bagi hasil terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA, terhadap realisasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi

hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap realisasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan jurusan akuntansi program studi akuntansi sektor publik.